

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh perkawinan transnasional yang merupakan bagian dari perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Bentuk perdagangan orang ini lebih banyak menimpa perempuan dikarenakan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga kecil kesempatan untuk melawan. Misalnya, kasus 11 perempuan di Sukabumi yang di perdagangan ke China dengan modus perkawinan transnasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Latar belakang ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah kasus terhadap 11 perempuan di Sukabumi yang dikirim ke China untuk dinikahkan merupakan kategori perdagangan orang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif.

Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan ataupun pengiriman dengan cara penipuan. Kasus perekrutan dan pengiriman 11 perempuan dari Indonesia ke China dengan cara penipuan menggunakan modus perkawinan merupakan kategori perdagangan orang. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warga negaranya walaupun belum secara maksimal karena belum adanya putusan akhir dari kasus tersebut.

Kata kunci: Kewajiban Negara, Perdagangan Perempuan

ABSTRACT

The background of this research by transnational marriage which is part of human trafficking that aims for sexual exploitation. This form of human trafficking more afflicts women than men because there is still discrepancy between women and men. In addition, women physically is weaker than men so the chance to counteract is small. For example, the case of 11 women in Sukabumi trafficked to China using transnational marriage modus. State has responsibility to protect its citizens. This background inflict problems are about the case of 11 women in Sukabumi whom transferred to China constitute the category of human trafficking also state responsibility toward the victim of human trafficking.

This research using doctrinal method of approach with research specification used is descriptive analytic. Data used in this research is secondary data which collected by library study. Data analysis was done using qualitative methods.

Human trafficking refers to recruitment or transfer by means of fraud, generally. The recruitment and transfer case of 11 women whom sent from Indonesia to China by means of fraud using marriage modus denote a category of human trafficking. Therefore, state has the responsibility to protect, respect and fulfill the rights of every victim even though not that maximal because there is still no final judgement about the cases

Keywords: State Responsibility, Women Trafficking